

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Konflik di Indonesia sudah merupakan kejadian yang sangat sering terjadi. Konflik tidak hanya terjadi dalam keluarga sebagai pribadi, melainkan sudah merebak pada tingkatan nasional. Letjen (Pur) Kiki Syahnakri di harian Umum Suara Pembaharuan menggambarkan bahwa sumber konflik di Indonesia setidaknya terdiri dari lima faktor, yaitu: ideologi/agama, politik, ekonomi, antar-etnis, dan separatisme (Syahnakri, 2004). Dari inventarisasi Panitia Pengawas Pemilu, setidaknya terdapat tujuh daerah yang rawan konflik di Indonesia. Di antaranya adalah kawasan Pantura, daerah "Tapal Kuda" di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kota Surakarta (Jawa Tengah), Kalimantan, Jawa Timur, dan Jakarta (Amin, 2004). Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang dipetakan sebagai daerah yang memiliki konflik tersebut, terutama konflik politik dan ekonomi. Madiun adalah salah satu wilayah di Jawa Timur yang dikenal sebagai daerah yang rawan konflik.

Madiun dipilih sebagai tempat penelitian karena Madiun merupakan salah satu daerah di pulau Jawa yang cukup fenomenal dengan intrik-intrik politiknya. Dengan luas wilayahnya yang relatif kecil namun daerah ini seringkali membuat berita besar, yang mana sampai terdengar di seluruh negeri ini bahkan mencuat

sampai di dunia internasional (radarmadiun.co.id). Salah satu peristiwa bersejarah di Madiun adalah Peristiwa Madiun (*Madiun Affairs*).

Peristiwa Madiun (*Madiun Affairs*) adalah sebuah konflik kekerasan yang terjadi di Jawa Timur bulan September hingga Desember 1948 konflik sesama golongan kiri yang anti imperialis. Peristiwa ini diawali dengan diproklamasikannya negara Soviet Republik Indonesia pada tanggal 18 September 1948 di Madiun oleh Muso, Seorang tokoh Partai Komunis Indonesia dengan didukung oleh Menteri Pertahanan saat itu, Amir Sjarifuddin. Pada saat itu hingga era Orde Lama peristiwa ini dinamakan Peristiwa Madiun (*Madiun Affairs*), dan tidak pernah disebut sebagai pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Baru di era Orde baru peristiwa ini mulai dinamakan pemberontakan PKI. Bersamaan dengan itu terjadi penculikan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Madiun yang tidak baik itu tokoh sipil maupun militer di pemerintahan ataupun tokoh-tokoh masyarakat dan agama.(<http://www.asal-usul.com/2009/03/peristiwa-dulu-pemberontakan-pki-madiun.html>)

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, muncul berbagai organisasi yang membina kader-kader mereka, termasuk golongan kiri dan golongan sosialis. Selain tergabung dalam Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), Partai Sosialis Indonesia (PSI) juga terdapat kelompok-kelompok kiri lain, antara lain Kelompok Diskusi Patuk, yang diprakarsai oleh Dayno, yang tinggal di Patuk, Yogyakarta. Yang ikut dalam kelompok diskusi ini tidak hanya dari kalangan sipil seperti D.N. Aidit, Syam Kamaruzzaman, dll., melainkan

kemudian juga dari kalangan militer dan bahkan beberapa komandan brigade, antara lain Kolonel Joko Suyono, Letkol Sudiarto (Komandan Brigade III, Divisi III), Letkol Soeharto (Komandan Brigade X, Divisi III. Kemudian juga menjadi Komandan Wehrkreis III, dan menjadi Presiden RI), Letkol Dahlan, Kapten Suparjo, Kapten Abdul Latief dan Kapten Untung Samsuri. (asal-usul.com)

Pada bulan Mei 1948 bersama Suripno, Wakil Indonesia di Praha, Muso, kembali dari Moskow, Rusia. Tanggal 11 Agustus, Muso tiba di Yogyakarta dan segera menempati kembali posisi di pimpinan Partai Komunis Indonesia. Banyak politisi sosialis dan komandan pasukan bergabung dengan Muso, antara lain Mr. Amir Sjarifuddin Harahap, dr. Setiajid, kelompok diskusi Patuk, dll. Aksi saling menculik dan membunuh mulai terjadi, dan masing-masing pihak menyatakan, bahwa pihak lainlah yang memulai. Banyak perwira TNI, perwira polisi, pemimpin agama, pondok pesantren di Madiun dan sekitarnya yang diculik dan dibunuh. Pada 19 September 1948, Presiden Soekarno dalam pidato yang disiarkan melalui radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk memilih: Muso-Amir Syarifuddin atau Soekarno-Hatta. Maka pecahlah konflik bersenjata, yang pada waktu itu disebut sebagai *Madiun Affairs* (Peristiwa Madiun), dan di zaman Orde Baru terutama di buku-buku pelajaran sejarah kemudian dinyatakan sebagai pemberontakan PKI Madiun. (asal-usul.com)

Meskipun selama ini Jawa Timur dipetakan sebagai daerah rawan konflik, hasil pengamatan selama ini Jawa Timur, yang dalam penelitian ini adalah Madiun, tidak menunjukkan eskalasi konflik sampai pada tingkat tertinggi yaitu

tindakan anarkis massa yang berakibat pada lumpuhnya kehidupan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Bahkan bila dibandingkan dengan di Jawa Tengah dan Jakarta di tahun 1997/1998, kondisi di Madiun relatif lebih kondusif dan hampir tidak terjadi kegiatan pembakaran (Suryanto, dkk., 2009).

Munculnya ketenangan warga, situasi kondusif, dan tidak munculnya potensi konflik yang ada dan tidak menimbulkan masalah ini tentunya tidak muncul tanpa alasan. Pada penelitian ini modal sosial dipandang sebagai modal yang diduga mampu meredam dan mereduksi konflik politik yang ada di masyarakat Jatim (Suryanto, dkk., 2009).

Fukuyama (1995) dalam bukunya "Trust" mendefinisikan bahwa modal sosial (*social capital*) sebagai norma informal yang dapat mendorong kerjasama antar anggota masyarakat. Dari definisi ini Fukuyama melihat bahwa aspek kerjasama (*cooperation*) menjadi unsur penting dalam berusaha. Untuk bekerjasama diperlukan kepercayaan diantara anggota kelompok yang bekerjasama. Oleh karena itu kepercayaan atau (*trust*) menjadi syarat yang mutlak. Bagaimana orang bisa kerjasama bila tidak didasari oleh sifat ini.

Ada banyak penelitian yang berkaitan dengan modal sosial dalam penyelesaian konflik, namun lebih banyak berfokus pada permasalahan sosial seperti, etnis, agama dan SARA. Diantara penelitian tersebut antara lain penelitian Alqadrie, 1999 (dalam Agus, 2007), meneliti konflik antar etnis di Ambon dan Sambas yang dikaji secara sosiologis, yang menghasilkan beberapa saran model penanganannya. Menurut Alqadrie penanganan ekses konflik antar etnis di

Ambon dan Sambas sebaiknya dilakukan dengan pemecahan yang bersifat jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Solusi pemecahan konflik tragedi Ambon dalam jangka pendek hendaknya dilakukan dengan cara melaksanakan dan melanjutkan pelaksanaan upacara adat Pela Gandong pada hari-hari besar nasional, dengan memasukkan upacara tersebut dalam acara pokok dimana melibatkan kelompok Islam dan Kristen secara adil dan seimbang. Pada solusi jarak menengah, model perekat sosial yang ditawarkan adalah: (1) Perlunya melakukan kawin campur antar etnis, dan (2) kemudian perlu mendirikan forum komunikasi antar kelompok etnis dan agama yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dalam berbagai tingkat pemerintahan (Dati II, Kecamatan, Lingkungan, Kampung). Adapun penyelesaian konflik untuk jangka panjang dengan: (1) Perlunya peningkatan pembinaan umat agama masing-masing secara terus menerus agar tidak hanya memiliki hubungan vertikal (*hablum minallah*), tetapi juga hubungan horisontal (*hablum minannaas*) yang tinggi. (2) Perlu otonomi daerah atas propinsi Maluku lebih ditingkatkan dan diperluas, (3) Pemerintah pusat hendaknya mengurangi kebijakan yang sentralistik dengan prinsip *Top-Down Policy*.

Pada kasus lain Alhumani, 1999 (dalam Agus, 2007) menawarkan beberapa hal model perekat sosial yang bersifat integratif di Tasikmalaya. Menurut Alhumani faktor integratif yang bisa meredam konflik adalah: (1) Doktrin agama Islam, dalam hal ini faham *ahlusunnah wal jamaah*. Doktrin ini memuat ajaran ukuwah islamiah yang menjadi pegangan setiap kelompok sosial yang terlibat

konflik. Kesadaran sebagai sesama pemeluk Islam menyebabkan mereka tetap harus saling menjaga keutuhan dan menghindari perpecahan. (2) Kepemimpinan Kyai yang menjadi figur sentral dalam masyarakat. Dengan kharisma dan kewibawaan seorang Kyai menjadikan setiap orang wajib menghormati atau bersikap tunduk dan patuh kepadanya. (3) Hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan dapat disebut faktor integratif yang dominan khususnya menyangkut konflik ideologi keagamaan. Tradisi masyarakat Sunda menempatkan hubungan kekerabatan pada posisi yang amat tinggi. (4) Kebudayaan lokal. Struktur kebudayaan di Sunda Tasikmalaya dibangun atas sendi-sendi harmoni sosial yang lebih mengutamakan keselarasan, keseimbangan, toleransi dan tenggang rasa dalam proses interaksi antar warga masyarakat. Keempat faktor ini menjadi elemen perekat dan sekaligus mengatasi pertentangan-pertentangan sosial. Model perekat sosial dengan memanfaatkan kepercayaan satu sama lain dalam hubungan antar etnis akan berdampak positif.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Lokollo, J.E (dalam Agus, 2007), mengenai “Kerusuhan di Maluku: Beberapa Masalah dan Kaitannya dengan Ketahanan Nasional”. Hasil penelitian tersebut membuahkan rekomendasi bentuk solusi alternatif, yakni perlunya : (1) Peningkatan hubungan-hubungan dialogis lintas SARA dengan mengadakan forum dialog. (2) Redefinisi dan revitalisasi peran dan fungsi institusi adat. Diperlukan pula legitimasi formal bagi institusi-institusi adat. (3) Diperlukan kebijakan kriminal pemerintah (di daerah) yang dimaksudkan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat, seperti norma hukum,

norma agama, adat dan kebudayaan. (4) Perlu dibutuhkan kebijakan pemerintah mengenai kependudukan dan penataan ruang untuk pengendalian arus urbanisasi dan migrasi. (5) Perlunya ketentuan-ketentuan dan peluang berusaha yang memperhatikan aspek-aspek pemerataan, keadilan, kesetaraan, tanpa berpihak pada kelompok manapun, dari segi etnis, agama, maupun ras. (6) Perlunya pembinaan dibidang kemasyarakatan terutama penanaman kesadaran, jiwa, semangat dan wawasan kebangsaan melalui kebijakan-kebijakan terpadu dengan melibatkan kepolisian, TNI, komponen masyarakat, agama dan pemuda. (7) Diperlukan upaya sosialisasi kesadaran bela negara dalam keluarga, lingkungan desa atau kota, wilayah melalui jalur pendidikan formal dan informal.

Pada kesempatan lainnya, Putnam (1995) melihat modal sosial sebagai fitur kehidupan sosial. Fitur ini terdiri dari jejaring (*networks*), norma (*norms*), kepercayaan (*trust*) yang mampu menggerakkan partisipasi anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Di samping itu, Lin (2001) mencoba membedakan konsep antara modal sosial dengan jaringan sosial (*social networks*). Dalam definisinya tentang modal sosial, ia menjelaskan bahwa modal sosial adalah sumber daya yang melekat dalam jaringan sosial dan digunakan oleh para pelakunya untuk mencapai tujuan tertentu.

Sebagai suatu modal dalam penyelesaian konflik, modal sosial yang berupa jaringan sosial, norma dan kepercayaan (Putnam, 1995) serta adanya sumberdaya yang melekat dalam jaringan sosial (Lin, 2001) akan dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik politik di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan

memfokuskan pada permasalahan modal sosial dan penyelesaian konflik politik di masyarakat Madiun. Dipilihnya Kabupaten Madiun sebagai lokasi penelitian karena di wilayah ini sudah membuktikan kecilnya konflik politik yang berakibat anarkisme walaupun potensi untuk terjadinya konflik horizontal sangat terbuka lebar.

## **1.2. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, yaitu modal sosial dan penyelesaian konflik politik di masyarakat Madiun, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- Bagaimana penyelesaian konflik berdasarkan modal sosial?
- a) Bagaimanakah pola konflik politik di masyarakat Madiun?
- b) Bagaimanakah pola penyelesaian konflik politik masyarakat Madiun?
- c) Bagaimana modal sosial menyelesaikan konflik politik di Madiun?
- d) Bagaimanakah modal sosial yang ada dikembangkan dan disosialisasikan kepada masyarakat Madiun dalam konteks penyelesaian konflik politik?

## **1.3. Signifikansi dan Keunikan Penelitian.**

Penelitian ini memiliki beberapa pertimbangan yang membuat peneliti merasa perlu melakukan penelitian ini. Pertimbangan tersebut diantaranya adalah:

- 1) Penelitian ini difokuskan pada permasalahan konflik politik.

- 2) Dilihat dari segi sejarah perpolitikannya, kasus-kasus konflik politik di Madiun cukup tinggi.
- 3) Madiun dipetakan sebagai daerah yang rawan konflik.
- 4) Banyak potensi konflik, namun yang sempat muncul tidak sampai menimbulkan anarkisme yang berlebihan.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dijabarkan pada fokus penelitian, yaitu:

- 1) Bagaimanakah pola konflik politik di masyarakat Madiun?
- 2) Bagaimanakah pola penyelesaian konflik politik masyarakat Madiun?
- 3) Bagaimana modal sosial menyelesaikan konflik politik di Madiun?
- 4) Bagaimanakah modal sosial yang ada dikembangkan dan disosialisasikan kepada masyarakat Madiun dalam konteks penyelesaian konflik politik?

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan manfaat untuk:

1. Secara praktis
  - a. Dari penelitian ini akan menggambarkan tentang peta konflik daerah yang berisikan modal sosial masyarakat yang nantinya bisa mengatasi konflik di daerah tersebut.

- b. Belum banyak model penanganan masalah konflik politik yang dikaji secara ilmiah berdasarkan pada modal sosial masyarakat setempat. Oleh karena itu dengan penelitian ini, dengan mengidentifikasi modal-modal sosial yang ada di masyarakat Madiun diharapkan dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik politik di Madiun.
2. Secara teoritis
    - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan/melahirkan konsep baru tentang modal sosial masyarakat dalam upaya menyelesaikan konflik politik yang terjadi di masyarakat.
    - b. Penelitian ini mendasarkan pada modal sosial yang ada sehingga harmonisasi kehidupan bermasyarakat dapat dicapai.